

“Kakaren” Formalin: Sebuah Bahan Renungan

Oleh: Dede Kosasih*

“Keine Zeit hat so viel und so mannigfaltiges vom Menschen gewusst wie die heutige...
Aber keine Zeit wuste wenig, was der Mensch sei, wie die heutige. Keine Zeit ist der Mensch
so fragwürdig geworden wie der Unsigen.”

(M.Heidegger, *“Kant und das Problem der Metaphysik”*, Bonn, 1929)

Kutipan di atas ini saya pergunakan sebagai wawasan dasar yaitu bahwa usaha pemahaman tentang martabat manusia dan kemanusiaan umumnya, tidak untuk berpretensi akan membawa pemahaman itu sampai pada suatu kesimpulan bulat dan final, apalagi sempurna, walaupun dikaji dari berbagai sudut pandang. Namun demikian, sekurang-kurangnya kita berikhtiar bersama untuk berkontemplasi memandang permasalahan yang dihadapkan kepada kita. Minimal mendapatkan wawasan tambahan yang bisa lebih memperkaya upaya kita memahami martabat manusia, yang berarti juga memahami diri kita sendiri.

Dalam keseluruhan akselerasi kehidupan manusia setiap tahap yang tercapai merupakan potensi bagi aktualisasi tahap berikutnya; meminjam istilah H. Bergson sebagai manifestasi *élan vital*. Kehidupan manusia tidak semata-mata didorong dan dikendalikan nalurinya untuk memenuhi berbagai kebutuhan (*needs*), melainkan juga oleh berbagai keinginannya (*wants*). Karena keinginan itu nyaris tiada batasnya, maka dorongan untuk memenuhi berbagai keinginan itu pun cenderung sulit dikendalikan. Apalagi kalau keinginan dihayati sebagai kebutuhan, maka muncullah gejala kerakusan (*greed*). Kesemuanya itu ditandai oleh perilaku posesif dan ekspansif yang beranjak dari pandangan materialistik.

Karena materi telah dijadikan panglima dan pemandu cita-cita kehidupan, maka setiap keinginan itu bukan sekedar hasrat *‘to have’* melainkan *‘to have more and more’*. Boleh jadi rujukan yang serba materi itu pada akhirnya berpengaruh juga terhadap cara pandang maupun gaya hidup (*life style*) kita; dan inilah awal dari suatu proses yang akhirnya bermuara pada perubahan orientasi nilai-nilai, sikap, dan mental.

Levine dan Adelman dalam bukunya *Beyond Language. Cross-Cultural Communication*, menyatakan bahwa *“culture is like an iceberg”*; budaya dianalogikan laksana bongkahan (gunung) es. Bongkahan es terdiri dari unsur yang muncul ke permukaan dan yang tersembunyi di bawah air. Unsur kedua ini memiliki volume yang jauh lebih besar. Dalam analogi ini, unsur-unsur kebudayaan yang muncul (kasat mata) ternyata tidak sebanyak yang tersembunyi. Unsur-unsur budaya yang dapat diamati secara kasat mata itu mencakup di antaranya bahasa, makanan, dan penampilan fisik. Sedangkan unsur-unsur budaya yang tersembunyi meliputi gaya berkomunikasi, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, dan persepsi.

Unsur budaya yang muncul ke permukaan (kasat mata) baru-baru ini, telah sangat sempurna dipanggungkan dengan lakon kasus kontroversi penggunaan formalin pada makanan. Berlomba-lombalah para pengamat maupun pejabat membuat analisa yang didasarkan pada unsur budaya yang kasat mata. Anggapan mereka bahwa kasus ini hanya sebatas urusan teknis, dan terkesan saling menyalahkan. Mulai dari peran pemerintah sebagai pengawas yang relatif kendor, regulasi tata niaga formalin yang terlalu longgar atau aturan main produksi makanan yang mudah diutak-atik, hingga kurangnya sosialisasi bahan pengawet yang dikategorikan aman.

Namun di balik kasus yang muncul ke permukaan, justru sebenarnya tersimpan “kakaren” yang maha dahsyat dan sangat serius (seperti halnya gunung es) menunggu penanganan komprehensif, yang bernama moralitas dan mentalitas bangsa.

Cara pandang yang dipergelarkan para pengguna formalin dalam perilaku ekonomi bangsa kita ini, hakekatnya sudah mengarah pada gejala kerakusan (*greed*) dan mendewakan mentalitas menerabas, karena preokupasinya bukan sekedar *‘the economics of needs’* melainkan *‘the economics of wants’*. Sehingga spektrum dari kasus ini memang

luar biasa dan sangat luas. Namun dampak yang sangat dirasakan justru membabat para pengusaha yang "*teu mais teu meuleum*". Banyak kaum termarjinal seperti: pedagang mie bakso/ayam, pedagang tahu hingga pengecer ikan asin di pasar becek (tradisional), sudah *colaps* dituduh pula dan diberi label sebagai "pedegar makanan berformalin". Sudah berapa banyak penjual mie keliling yang menggantungkan pikulan dan rodanya, terpaksa harus segera pulang kampung dengan tangan hampa.

Pilihan menggunakan formalin oleh para pengusaha (pedagang) "nakal" mie basah, tahu, ikan asin sebagai pelaku ekonomi, boleh jadi merupakan representasi gejala kerakusan dan mendewakan jalan pintas itu agar dagangannya lebih awet dan meraup untung yang melimpah. Padahal sejatinya, jalan yang benar adalah bahan pengawet yang aman, namun harganya jelas jauh lebih mahal. Maka konsekuensinya, semakin mahal biaya produksi, berarti semakin susut keuntungan yang diperoleh.

Dalam hal ini ternyata moralitas disingkirkan. Sebab moralitas itu menuntut supaya kita menyeimbangkan kepentingan kita dengan kepentingan yang lain. Kepentingan produsen (pembuat tahu) itu adalah keuntungan besar sehingga diupayakan barang dagangannya bisa bertahan beberapa hari. Kalau dibiarkan sehari sudah rusak (busuk) tentu akan berbuntut kerugian. Sementara kepentingan konsumen adalah mengkonsumsi tahu yang sehat, dan tidak membahayakan tubuh. Namun, sikap egois itu tidak mempertemukan antara "tahu awet" dengan "tahu sehat".

Boleh jadi mereka paham benar akan informasi yang dinyatakan pemerintah sebagai bahan berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan merekapun mengetahui bahwa peruntukan formalin salah satunya adalah bahan pengawet mayat. Aturan pemerintah sudah jelas melarang formalin dipakai untuk keperluan makanan. Namun aturan tinggal aturan, kenyataannya masih saja diterabas. Hal ini merupakan cerminan bangsa kita yang egois, *ngeunah Eon teu ngeunah Ehe*. Inilah yang dimaksud oleh filsuf James Rachel sebagai *egoisme-etis*, sebagaimana dikutip Toto Suparto (Kompas,28/1/06). Apa mau dikata, *egoisme etis* memang mengajarkan seseorang untuk mengatakan, "kita tidak mempunyai kewajiban moral, selain melulu menjalankan apa yang paling baik bagi diri kita sendiri."

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya *Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan*, bahwa mentalitas menerabas itu pada dasarnya juga dapat disamakan dengan "mentalitas mencari jalan paling gampang". Pantas saja klaim Mohtar Lubis dalam bukunya *Manusia Indonesia* tegas-tegas menyatakan bahwa salah satu ciri manusia Indonesia adalah memiliki mental suka mencari jalan pintas. Manakala memilih jalan pintas sebagai cara ilegal, berarti peran orang lain dipinggirkan. Mereka tidak mau tahu dampaknya bagi kebanyakan orang. Intinya mereka tidak memperdulikan orang lain. Tujuan yang terpenting dalam benaknya adalah menguntungkan diri sendiri. Jadi, "kakaren" itu boleh dibilang sebagai representasi bangsa yang carut marut, mencerminkan bangsa kita yang telah kehilangan adab, mudah memilih jalan pintas, suka yang ilegal dan tidak peduli orang lain. Maka praktik jalan pintas, suka yang ilegal dan tidak peduli orang lain dalam penggunaan formalin itu menurut bahasa Toto Suparto (Kompas, 28/1/2006) adalah bentuk perilaku *formalinisme*. Perilaku yang dalam benak bangsa Indonesia dewasa ini dianggap sesuatu yang galib dan jamak.

Apakah hanya pembuat dan pedagang tahu, mie baso, ikan asin yang tergolong *egoisme etis* itu? Secara jujur harus dikatakan, *egoisme etis* itu bukan hanya milik kaum formalin, tetapi sudah menyeruak ke dalam panggung kehidupan lain meluas menembus lapisan masyarakat bangsa kita.

Coba simak bagaimana sepak terjang wakil kita di dewan, yang notabene hasil dari pemilihan yang demokratis. Dengan penuh kesadaran, rakyat memilih sehingga mendudukan para wakil di kursi empuk. Tapi, manakala mereka sudah duduk, apa yang pernah dijanjikannya dalam kampanye, yang diperhatikannya bukan rakyat yang diwakilinya. Malah mereka sibuk memperjuangkan kenaikan gaji, berbagai fasilitas lainnya, seperti fasilitas mesin cuci, tunjangan telepon, jatah naik haji, jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan yang paling memalukan adalah menjadi calo bantuan bencana alam.

Berbagai kepentingan rakyat yang pernah dijanjikannya terlupakan atau sengaja dicampakkan. Bukankah kenyataan ini merupakan bagian dari formalisme?

SALAH satu urusan besar dan mendesak bagi bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana merombak mentalitas atau cara berpikir yang mendewakan jalan pintas (menerabas) dan aji mumpung. Yaitu, mengejar hasil tanpa mengindahkan proses.

Dampak dari kedua mentalitas itu sangat nyata yaitu tumbuh suburnya korupsi. Korupsi adalah jalan pintas menuju kaya (sebagai hasil akhir) dengan cara-cara yang tidak lazim, seperti: menyikat keuntungan sebesar-besarnya (aji mumpung). Mumpung memikul suatu jabatan, mumpung ada kesempatan dan tidak perlu kerja keras, jujur, produktif, dan efisien (sebagai proses). Baik korupsi maupun aji mumpung, kedua-duanya disebabkan oleh gejala memudarnya (krisis) norma-norma terurai di atas. Kata 'korupsi' makin lama makin menjadi sajian sehari-hari melalui berbagai pernyataan publik dan melalui liputan dan tayangan berbagai media massa. Contoh lain, orang tidak mau antre yang tertib, tetapi main serobot. Yang penting tujuan tercapai, dan bukan soal bagaimana caranya.

Bukankah banjir bandang di Jember belum lama ini juga bagian dari formalisme? Mari kita urai. Banjir itu terjadi karena penggundulan hutan di sekitarnya. Si penggundul ternyata sudah melakukan praktik formalisme yakni memilih jalan ilegal saat menebang kayu, yang memunculkan istilah *illegal logging*. Cara ilegal ini merupakan representasi jalan pintas untuk memperoleh kayu murah dengan keuntungan melimpah. Lagi pula menjualnya mudah, karena siap ditampung para penadah.

Keuntungan adalah tujuan hakiki, tak peduli orang lain ketiban musibah. Banjir yang memporakporandakan pemukiman di sekitar hutan dianggap sebagai hal lumrah di musim hujan. Kalau para penebang ilegal itu ditanya, apakah dengan menggunduli hutan tidak takut ancaman banjir? Mereka bakal menjawab, "Apa yang perlu ditakutkan, karena kami toh tidak tinggal di sekitar hutan."

Dalam panggung kehidupan lain bahasa-bahasa serupa sudah galib akan kita jumpai. Coba tanyakan kepada pemborong gedung sekolah dasar, apakah dengan mengurangi standar konstruksi tidak takut sekolah cepat roboh? Maka jawabnya, "Peduli amat, keluarga saya tidak ada yang sekolah di sini." Tanyakan pula kepada pemborong jembatan, apakah mengubah ukuran besi beton tak takut mempercepat jembatan putus atau roboh? Maka jawabnya "Peduli amat, saya tidak pernah melintas jembatan itu" Tol Cipularang....Kalau saja pengoplos avtur dan air ditanya, apakah tindakan mencampur itu tidak khawatir membuat pesawat jatuh? Maka jawabnya, menirukan grup lawak TPI *Bajaj*, "Ya gitu deh!?"

Jawaban-jawaban peduli amat...adalah representasi dari egoisme etis itu. Orang cenderung lebih senang memikirkan diri sendiri karena orang lain juga tak ada yang peduli. Toh orang lain juga asyik memikirkan diri sendiri. Lalu kenapa (kita) mesti susah-susah untuk peduli kepada yang lain? Ya kita ikuti saja apa yang banyak dilakukan orang lain. Begitulah kira-kira jalan pikiran (kaum) formalin itu.

Membangun moralitas

Solusi serius dari formalisme bukanlah melulu soal teknis, tetapi akar permasalahan adalah moralitas. Kalau soal moral, tetap seperti sekarang ini, segala aturan teknis masih bisa "diakali" untuk dilanggar. Pelaku tidak memiliki kontrol nurani. Pejabat, aparat hukum maupun komponen kekuasaan lain merupakan unsur yang bisa ditaklukan. Lagi-lagi cara ilegal menjadi andalan.

Bagi yang sudah kecanduan formalisme, maka dibutuhkan obat mujarab yakni membangun moralitas. Jenis obat ini adalah "power distance" yakni sebuah bentuk pencerahan religiusitas.

Beberapa studi melihat adanya korelasi moralitas dengan unsur religius. Walaupun dalam kiprahnya ada perdebatan tentang hubungan moralitas dan agama. Rachel (2003) jelas-jelas membedakan moralitas dan agama. Moralitas itu menyangkut soal akal dan kesadaran, bukan iman keagamaan. Dalam kasus tertentu, kesadaran

keagamaan tidak menjamin pemecahan definitif terhadap masalah-masalah moral yang dihadapi manusia.

Filsuf moral lainnya, Henry Hazlitt (1964) mengemukakan agama dan moralitas seperti dua arus yang sering kali berjalan paralel, bercampur, terpisah, tampak independen dan acap kali saling bergantung. Dalam konteks saling bergantung ini yang sering terjadi adalah "saling menopang" Kepercayaan religius menopang moralitas. Hal ini semata-mata berangkat dari kepercayaan bahwa Tuhan melihat setiap tindakan kita. Jadi orang beriman takut dilihat Tuhan manakala berbuat tidak baik. Inilah kekuatan besar dalam perilaku etis.

Sebagian besar pemuka agama negeri ini cenderung menganut konsep Hazlitt. Orang religius sejatinya lebih mempertimbangkan moralitas. Atas dasar inilah pemuka agama punya peran untuk memperbaiki moral bangsa. Mereka membangun kekuatan moral bukan sekedar lewat ceramah agama, tetapi juga teladan.

Soal teladan inilah kita sangat kurang. Jarang sekali pemimpin yang bisa dijadikan teladan moral. *Wong cilik* menjalani formalisme lantaran *wong Gede* tidak memberi sesuatu yang baik. Jadi hal ini merupakan *banalitas* yang siklusnya dimulai dari pemimpin. Hanya ada satu kunci, agar masyarakat bermoral maka dibutuhkan pemimpin moralis. Kita bisa lihat sendiri. Bagaimana kualitas moral para pemimpin (termasuk wakil rakyat di DPR) yang mengemudikan negara dan bangsa ini? Jangan kaget, suatu saat formalisme tetap subur di negeri ini. Cag!

* *Pemerhati Budaya, Lektor Kepala pada Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI Bandung*